



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2020**



**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 dan mempertimbangkan usulan kegiatan dari Inspektur Pembantu Wilayah dan kemudian disesuaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semoga Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi Inspektorat Daerah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan kinerja ditahun 2020.

Luwuk, Agustus 2019

INSPEKTUR,



**IMRAN SUNI, SE., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630322 1991 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai	49
3.3 Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020	50



*Rencana Kerja Tahun 2020*  
*Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai*

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI	52
BAB V	PENUTUP	53
Lampiran		



## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
Tabel 2.2.1 Target dan Capaian IKU Tahun 2018	41



*Rencana Kerja Tahun 2020*  
*Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Rumusan program, kegiatan dan pendanaan tahun 2020



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

---

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini telah berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan beribawa.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah dokumen



perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang





- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 8);
  6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
  7. Reviu Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA dan penetapan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai serta tolak ukur pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara sektor-sektor pembangunan dan diharapkan Renja dapat menjadi kerangka dasar Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan serta mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi



kegiatan baik secara internal maupun eksternal, sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2020 dapat tercapai.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Proses perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan; berisi latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
  - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya; berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020
  - Bab III : Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan; berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2020 dan Program dan Kegiatan Tahun 2020
  - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan; berisi uraian rencana kegiatan dan rencana pendanaan Tahun 2020
  - Bab V : Penutup
- Lampiran



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

### **TAHUN SEBELUMNYA**

---

---

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai**

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Aparat Pengawasan Internal mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan juga melakukan pembinaan dan monitoring tindak lanjut. Kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai pembantu pimpinan puncak (Top Management) Institusi dalam pengawasan internal.

Pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 tentu banyak kendala dan permasalahan, sehingga realisasi yang diharapkan tidak tercapai sebagaimana semestinya. Namun terdapat beberapa kegiatan yang sesuai target bahkan melebihi target. Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

##### **a. Program pelayanan administrasi perkantoran**

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 11 kegiatan, yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa



komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan pengadaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta penyediaan jasa administrasi perkantoran. Berikut uraian capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program ini.

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan materai untuk penggunaan administrasi perkantoran Inspektorat Daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 7.101.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.101.000,- atau 100%.

Capaian indikator jumlah materai 6000 dan 3000 terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah materai 6000 dan 3000	1.367 lembar	1.367 lembar	100

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa telepon, internet, listrik dan air untuk kebutuhan perkantoran. Anggaran



yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 77.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.588.037,- atau 76,43%.

Capaian indikator jumlah jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jaringan	4 jaringan	100

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pembayaran pajak kendaraan dinas. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 6.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.100.000,- atau 75%.

Capaian indikator jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas terealisasi 41,67% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.



<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah STNK kendaraan roda dua dan roda empat	2 unit roda empat 11 unit roda dua	2 unit roda empat 3 unit roda dua	41,67

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa kebersihan kantor serta pengadaan alat dan bahan pembersih. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 44.261.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.261.550,- atau 100%.

Capaian indikator jumlah jasa kebersihan dan bahan/alat pembersih terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Output kegiatan ini terdiri dari 2 orang jasa kebersihan serta 12 jenis alat dan bahan pembersih. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah jasa kebersihan dan bahan/alat pembersih	2 orang dan 12 jenis	2 orang dan 12 jenis	100

5) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan alat tulis kantor. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini



berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 49.240.675,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.210.700,- atau 99,94%.

Capaian indikator jumlah jenis ATK terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja . Output kegiatan ini terdiri dari 15 jenis alat tulis kantor. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah jenis ATK	15 jenis	15 jenis	100

6) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 11.178.125,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.734.300,- atau 51,30%.

Capaian indikator jumlah cetakan, penggandaan dan penjilidan terealisasi 48,69% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Output kegiatan ini terdiri dari barang cetakan, penggandaan dan penjilidan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.



<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah cetakan, penggandaan dan penjilidan	30 pak 11 blok 6.175 lembar 100 buah	20 pak 11 blok 2.944 lembar 100 buah	48,69

7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan koran. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 1.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau 66,67%. Penyediaan bahan bacaan ini adalah belanja langganan koran yang disediakan dana Rp. 150.000,- per bulan. Namun saat realisasi dana yang dikeluarkan adalah Rp. 100.000,- per bulan. Oleh karena itu, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 600.000,-

Capaian indikator tersedianya buku dan peraturan perundang-undangan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah langganan koran	1 koran/12 Bulan	1 koran/12 Bulan	100

8) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan makanan dan minuman rapat. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan





kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 29.636.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.012.000,- atau 87,77%.

Capaian indikator jumlah makanan dan minuman terealisasi 87,87% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah makanan dan minuman	569 Dos	500 Dos	87,87

9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 337.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 324.697.633,- atau 96,26%.

Capaian indikator jumlah perjalanan dinas luar daerah terealisasi 92,31% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah perjalanan dinas luar daerah	26 kali	24 kali	92,31

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah



Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.967.810,- atau 83,73%.

Capaian indikator jumlah perjalanan dinas dalam daerah terealisasi 82,5% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	80 kali	66 kali	82,5

#### 11) Penyediaan Jasa administrasi perkantoran

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan honorarium bulanan dan makan lembur. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 76.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.800.000,- atau 92,19%.

Capaian indikator jumlah jasa administrasi terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah jasa administrasi	5 orang	5 orang	100



**b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 8 kegiatan, yaitu pengadaan kendaraan dinas operasional, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan meubelair, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Berikut uraian capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program ini.

1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kendaraan dinas operasional roda dua. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.310.000,- atau 97,31%.

Capaian indikator jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana dibidang pengawasan.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	5 unit	5 unit	100



2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan perlengkapan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 46.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.308.500,- atau 87,63%. Perlengkapan kantor yang diadakan terdiri dari pengadaan AC 3 unit, pengadaan layar proyektor 1 unit dan pengadaan CCTV 1 set.

Capaian indikator jumlah perlengkapan kantor terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	5 unit	5 unit	100

3) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 102.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.703.800,- atau 94,35%. Peralatan kantor yang diadakan terdiri dari mesin penghancur kertas 2 unit, notebook 5 unit, komputer PC 3 unit dan printer 5 unit.

Capaian indikator jumlah peralatan kantor terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor



pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah peralatan kantor yang diadakan	15 unit	15 unit	100

4) Pengadaan meubelair

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan lemari arsip. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.

Capaian indikator jumlah meubelair yang diadakan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah meubelair yang diadakan	4 unit	4 unit	100

5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 44.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.990.517,- atau



99,98%. Kendaraan dinas roda dua yang dilakukan pemeliharaan berjumlah 14 unit dan roda empat berjumlah 2 unit.

Capaian indikator jumlah kendaraan roda dua dan empat yang dipelihara terealisasi 56,25% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah kendaraan roda dua dan empat yang dipelihara	16 unit	16 unit	100

6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pemeliharaan rutin pendingin ruangan (AC). Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100%.

Capaian indikator jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 unit	15 unit	100



7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pemeliharaan rutin notebook dan printer. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 11.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.750.000,- atau 100%. Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan yaitu 14 unit notebook dan 10 unit printer.

Capaian indikator jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	24 unit	24 unit	100

8) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan rehabilitasi sedang gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPA Penetapan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 220.000.000,-. Namun, pada DPPA dilakukan perubahan, yaitu merelokasi anggaran kegiatan ini ke kegiatan yang lebih membutuhkan. Selain itu, setelah dilakukan analisa kembali jumlah anggaran tersebut tidak dapat mendanai rehabilitasi gedung yang awalnya direncanakan. Oleh karena itu, capaian kegiatan ini tidak ada.



**c. Program peningkatan disiplin aparatur**

Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Berikut uraian capaian kinerja kegiatan dalam program ini.

1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pakaian batik tradisional, pakaian olahraga dan sepatu olahraga. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 80.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.500.000,- atau 100%. Pakaian batik tradisional yang diadakan berjumlah 55 pasang, pakaian olahraga 60 pasang dan sepatu olahraga 60 pasang.

Capaian indikator jumlah pakaian batik tradisional, pakaian olahraga dan sepatu olahraga yang diadakan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan disiplin aparatur.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah pakaian batik tradisional, pakaian olahraga dan sepatu olahraga yang diadakan	175 psg	175 psg	100





**d. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS**

Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu pemulangan pegawai yang pensiun. Berikut uraian capaian kinerja kegiatan dalam program ini.

1) Pemulangan pegawai yang pensiun

Kegiatan ini bertujuan untuk fasilitasi purna PNS. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.186.500,- atau 61,24%.

Capaian indikator jumlah purna PNS yang difasilitasi terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk pencapaian pemulangan purna tugas PNS.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah purna PNS	3 orang	3 orang	100

**e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu pendidikan dan pelatihan formal. Berikut uraian capaian kinerja kegiatan dalam program ini.

1) pendidikan dan pelatihan formal

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan/fasilitasi pendidikan dan pelatihan formal dalam bentuk diklat pembentukan fungsional dan diklat penjenjangan. Anggaran yang



disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 148.610.000,- atau 92,88%.

Capaian indikator jumlah ASN yang mengikuti diklat penjenjangan dan sertifikasi fungsional terealisasi 83,33% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah ASN yang mengikuti diklat penjenjangan dan sertifikasi fungsional	24 Orang	20 Orang	83,33

**f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 4 kegiatan, yaitu penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan pelaporan keuangan semesteran, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun serta penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD. Berikut uraian capaian kinerja kegiatan tersebut.

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan kinerja Inspektorat seperti LKjIP, LPPD dan LKPJ. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA



Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.903.500,- atau 72,59%.

Capaian indikator jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk pemenuhan pelaporan capaian kinerja.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	100

2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan semesteran. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 2.631.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.631.500,- atau 62%.

Capaian indikator jumlah laporan keuangan semesteran terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk pemenuhan pelaporan keuangan semesteran.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan	100



3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.904.000,- atau 98,08%.

Capaian indikator jumlah laporan keuangan akhir tahun terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk pemenuhan pelaporan keuangan akhir tahun.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	100

4) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan rentra, renja, RKA/RKPA dan DPA/DPPA. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 5.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.159.400,- atau 99,99%.

Capaian indikator tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk pemenuhan dokumen perencanaan dan anggaran.



<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 dokumen	6 dokumen	100

**g. Program pengembangan sistem informasi/data**

Program pengembangan sistem informasi/data terdiri dari 1 kegiatan, yaitu pemutakhiran sistem informasi database. Berikut uraian capaian kinerja kegiatan tersebut.

1) Pengembangan sistem informasi/data

Kegiatan ini bertujuan untuk pembuatan website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.950.000,- atau 69,50%.

Capaian indikator jumlah website terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk pengembangan sistem informasi.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah website	1 web	1 web	100



**h. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, bimtek internal auditor dan P2UPD serta Sertifikasi JFA dan P2UPD. Berikut uraian capaian kinerja kegiatan tersebut.

- 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan keikutsertaan diklat substantif bidang pengawasan. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 215.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 163.325.133,- atau 75,97%.

Capaian indikator jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis substantif bidang pengawasan terealisasi 83,33% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis substantif bidang pengawasan	12 orang	10 orang	83,33



2) Bimtek internal Auditor dan P2UPD

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan diklat pembentukan dan penjenjangan fungsional. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 177.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 172.218.909,- atau 97,30%.

Capaian indikator tersedianya diklat pembentukan auditor dan P2UPD terealisasi 83,33% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah ASN yang mengikuti diklat pembentukan/penjenjangan	12 orang	10 orang	83,33

3) Sertifikasi JFA dan P2UPD

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sertifikasi jabatan fungsional auditor dan P2UPD. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.429.000,- atau 74,62%.

Capaian indikator tersedianya sertifikasi auditor dan P2UPD terealisasi 83,33% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.



<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah sertifikasi auditor dan P2UPD	12 orang	10 orang	83,33

**i. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah (KDH)**

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah (KDH) terdiri dari 20 kegiatan, yaitu pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, inventarisasi temuan pengawasan, tindak lanjut hasil temuan pengawasan, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, penanganan khusus permasalahan lingkup PEMDA (pemeriksaan khusus atas perintah atasan langsung), pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan inspektorat provinsi, pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPKP, pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPK, pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan Irjen Kementerian, evaluasi LAKIP Satuan Kerja, evaluasi reformasi birokrasi, evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, koordinasi, monitoring dan evaluasi, review laporan keuangan Pemerintah Daerah, review sakip kabupaten, review RKA OPD, review PBJ dan Dana Desa, pemantuan pelaksanaan SPIP dan pendampingan pemeriksaan BPK. Berikut uraian capaian kinerja kegiatan-kegiatan tersebut.

1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan





ini merupakan indikator utama pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 1.210.487.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.152.324.500,- atau 95,20%.

Capaian indikator jumlah laporan pengawasan internal terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari:

- Laporan hasil pemeriksaan APBDesa sebanyak 384 laporan;
- Laporan hasil pemeriksaan SMP sebanyak 56 laporan;
- Laporan hasil pemeriksaan OPD/SKPD sebanyak 68 laporan;
- Laporan klinik konsultasi mobile sebanyak 24 laporan.

Faktor pendukung pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. Sedangkan faktor yang tidak mendukung pencapaian target adalah jumlah obyek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah pengawas dan pemeriksa yang ada.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan pengawasan internal	532 laporan	532 laporan	100



2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 100.281.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.091.355,- atau 84,85%.

Capaian jumlah laporan penanganan kasus pengaduan terealisasi 70,58% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

- Komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
- Tanggungjawab penyelesaian tugas dengan baik;
- Komitmen menciptakan pemerintahan yang baik;
- Komitmen melayani stakeholder dengan baik.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan penanganan kasus pengaduan	17 laporan	12 laporan	70,58

3) Inventarisasi temuan pengawasan

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan inventarisasi hasil temuan pengawasan. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 18.705.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.140.700,- atau 59,56%.

Capaian indikator jumlah dokumen inventarisasi hasil pengawasan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian



target adalah adanya komitmen untuk pengumpulan, pengklasifikasian dan penataan dokumen hasil pengawasan.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah dokumen inventarisasi hasil pengawasan	5 dokumen	5 dokumen	100

#### 4) Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 190.265.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 188.259.000,- atau 98,95%.

Capaian indikator jumlah laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan yang terdiri dari:

- Tindak lanjut hasil pemeriksaan APBDesa se-Kabupaten Banggai.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan sekolah se-Kabupaten Banggai.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk mendorong penyelesaian temuan hasil pengawasan dan komintmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal. Sedangkan faktor penghambat adalah masih terdapat obyek pemeriksaan yang kurang maksimal dalam melakukan penyelesaian temuan hasil pengawasan.



<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan	2 laporan	2 laporan	100

5) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi berkala penyelesaian temuan hasil pengawasan. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 295.505.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 286.442.186,- atau 96,93%.

Capaian indikator jumlah laporan evaluasi temuan hasil pengawasan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan yang terdiri dari:

- Tindak lanjut hasil pemeriksaan OPD se-Kabupaten Banggai
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaiantarget adalah adanya komitmen untuk mendorong penyelesaian temuan hasil pengawasan dan komintmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal. Sedangkan faktor penghambat adalah masih terdapat obyek pemeriksaan yang kurang maksimal dalam melakukan penyelesaian temuan hasil pengawasan.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan evaluasi temuan hasil pengawasan	2 laporan	2 laporan	100



6) Penanganan khusus permasalahan lingkup PEMDA (pemeriksaan khusus atas perintah atasan langsung)

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penanganan khusus permasalahan lingkup pemerintah daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 277.262.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 218.457.399,- atau 78,79%.

Capaian jumlah laporan pemeriksaan khusus terealisasi 50% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan pemeriksaan khusus	4 laporan	2 laporan	50

7) Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pembahasan dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.945.133,- atau 79,84%.

Capaian indikator jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung



keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk mendorong penyelesaian dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	1 laporan	1 laporan	100

8) Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPKP

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pembahasan dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.610.000,- atau 98,05%.

Capaian indikator jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk mendorong penyelesaian dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP	1 laporan	1 laporan	100

9) Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPK

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pembahasan dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini



berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 104.727.241,- atau 83,78%.

Capaian indikator jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk mendorong penyelesaian dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	2 laporan	2 laporan	100

10) Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan Irjen Kementerian

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pembahasan dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Irjen Kementerian. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

Capaian indikator jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Irjen Kementerian terealisasi 0% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Kegiatan ini diikuti sesuai undangan yang diterima.



<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Irjen Kementerian	-	-	-

#### 11) Evaluasi LAKIP Satuan Kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satuan kerja. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPA penetapan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 2.597.500,-. Anggaran pada kegiatan ini direlokasi, namun evaluasi tetap dilaksanakan.

Capaian jumlah laporan evaluasi terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan evaluasi	15 OPD	15 OPD	100

#### 12) Evaluasi reformasi birokrasi

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 83.097.500,-. Anggaran pada kegiatan ini direalisasikan untuk keikutsertaan pada sosialisasi tentang pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi.





Capaian jumlah laporan evaluasi terealisasi 0% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Kegiatan evaluasi akan mulai dilaksanakan pada tahun 2019.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan evaluasi	-	-	-

### 13) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi program strategis nasional. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 38.097.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Untuk tahun 2018 tidak terdapat program strategis nasional di Kabupaten Banggai. Sehingga evaluasi tidak dilaksanakan.

Capaian jumlah laporan evaluasi terealisasi 0% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan evaluasi	-	-	-

### 14) Koordinasi, monitoring dan evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.762.352,- atau 69,52%.



Capaian jumlah laporan monitoring dan evaluasi terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 laporan	1 laporan	100

#### 15) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 45.101.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.600.850,- atau 96,67%.

Capaian indikator jumlah laporan review terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan review	1 laporan	1 laporan	100

#### 16) Review Lakip/Sakip Kabupaten

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan review Lakip/Sakip Kabupaten. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan



kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 2.695.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 991.000,- atau 36,77%.

Capaian indikator jumlah laporan review terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan review	1 laporan	1 laporan	100

#### 17) Review RKA-OPD

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan review RKA-OPD. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 5.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.983.500,- atau 37,71%.

Capaian indikator jumlah laporan review terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan review	1 laporan	1 laporan	100



#### 18) Review PBJ dan Dana Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan review pengadaan barang dan jasa serta realisasi dana desa. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 54.695.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.541.700,- atau 85,09%.

Capaian indikator jumlah laporan review terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan review	1 laporan	1 laporan	100

#### 19) Pemantauan pelaksanaan SPIP

Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 32.662.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.859.100,- atau 94,48%.

Capaian indikator jumlah hasil evaluasi terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.



<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan evaluasi	1 laporan	1 laporan	100

#### 20) Pendampingan pemeriksaan BPK

Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi BPK dalam pemeriksaan reguler setiap tahunnya di Kabupaten Banggai. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar Rp. 18.612.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.026.000,- atau 91,48%.

Capaian indikator jumlah hasil pendampingan terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah laporan pendampingan	1 laporan	1 laporan	100

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai



dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*ongoing*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas.

Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2016-2021, Inspektorat mengacu pada misi 1 yaitu "*Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa*". Untuk mewujudkan misi tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai merumuskan tujuan, yaitu:

*"Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkinerja"*

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah, dengan indikator sasaran sebagai berikut :



- a. Persentase SAKIP OPD dengan nilai minimal B;
  - b. Level maturitas penerapan SPIP;
  - c. Persentase penurunan temuan hasil pengawasan;
  - d. Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti.
2. Meningkatnya tata kelola inspektorat yang baik, bersih, akuntabel dan profesional, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Persentase peningkatan disiplin ASN;
  - c. Level kapabilitas APIP.

Sasaran dan indikator di atas juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai. Berikut target dan capaian IKU tahun 2018.

Tabel 2.2.1  
Target dan Capaian IKU Tahun 2018

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah	Persentase SAKIP OPD dengan nilai minimal B	100%	100%
		Level maturitas penerapan SPIP	Level 3	Level 3
		Persentase penurunan temuan hasil pengawasan	25%	28,25%
		Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti	80%	58,38%
		Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 2



Berdasarkan tabel terlihat bahwa 2 dari 5 target tidak tercapai. Hal ini disebabkan diantaranya karena:

- a. Masih kurangnya frekuensi kegiatan tindak lanjut hasil temuan
- b. Masih kurangnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah**

Dalam menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) :
  - a. Masih Kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP);
  - b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
  - c. Belum adanya diklat kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi pembina.
2. Sarana Prasarana :
  - a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
  - b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
  - c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

Upaya-upaya mengatasi kendala dan hambatan :

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPKP dan BPK-RI;





2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah untuk optimalisasi :
4. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
5. Membangun Sistem Pengendalian Intern.
6. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
7. Mengajukan ke Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk pelaksanaan Inpassing dan Diklat kompetensi khusus bagi P2UPD;
8. Mengikutsertakan Bimbingan teknis teknologi Informasi bagi tenaga pemeriksa;
9. Merumuskan perencanaan kebutuhan sarana penunjang teknologi informasi;
10. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat;
11. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banggai.

Adapun isu strategis untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta



- memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Terjalinnnya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
  3. Terjalinnnya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern.
  4. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai akan manfaat pembinaan dan pengawasan.
  5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
  6. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai tidak terlepas dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai. Salah satu permasalahan pembangunan daerah yang diangkat dalam RKPD Kabupaten Banggai yang berhubungan dengan tupoksi Inspektorat adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat sangat baik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Banggai yang ditunjukkan dengan hasil evaluasinya.



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Banggai tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Banggai belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stake holders*.

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu (IRBAN) dengan mengacuh pada Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang kemudian dilakukan penyelarasan pada sekretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah ditetapkan pada Tahun 2015 untuk periode 2015-2019 yang mengambil Visi “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dari Visi ini terdapat 7 misi penunjang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan Sumber Daya Maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka terdapat 9 agenda prioritas dalam NAWACITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman kepada seluruh warga.



2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama Negara Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, Inspektorat Daerah melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Sasaran pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berfokus pada:

- 1) Perencanaan dan penganggaran daerah;
- 2) Pajak dan retribusi daerah;
- 3) Hibah dan bantuan sosial;
- 4) Pengadaan barang dan jasa;



- 5) Perizinan dan non perizinan; dan
- 6) Perjalanan dinas.

Sasaran pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berfokus pada:

- 1) Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi; dan
- 2) Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Sedangkan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah meliputi pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah yang diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:

- a. Kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
- d. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
- e. Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
- f. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.



### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun 2020**

Tujuan dan sasaran suatu unit kerja merupakan prioritas tertinggi dalam suatu perencanaan. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai bersumber dari prioritas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Inspektorat selama lima tahun kedepan.

Misi pertama Pemerintahan Kabupaten Banggai menjadi pedoman menentukan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai. Sasaran Inspektorat Daerah meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai
- 2) Nilai akuntabilitas kinerja

Tujuan Inspektorat Daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Persentase SAKIP OPD dengan nilai minimal A;
  - b. Persentase penurunan temuan hasil pengawasan;
  - c. Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti.
  - d. Level kapabilitas APIP.
- 2) Meningkatnya tata kelola inspektorat yang baik, bersih, akuntabel dan profesional, dengan indikator sebagai berikut :
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Persentase peningkatan disiplin ASN;



### **3.3 Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun 2020**

Berpedoman pada program/kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahun 2019, maka Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan terdiri dari 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 875.254.500,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan terdiri dari 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.331.680.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan terdiri dari 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 180.150.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 396.750.000,-
5. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan terdiri dari 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.402.000,-
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan prioritas yang hanya terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.299.648.000,-
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan





***Rencana Kerja Tahun 2020  
Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai***

prioritas yang akan dilaksanakan terdiri dari 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.108.115.500,-

Berdasarkan uraian di atas maka anggaran yang dibutuhkan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dengan rincian program/kegiatan sebagaimana terlampir.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH**

---

Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 terdiri dari 7 program dan 36 kegiatan dengan rincian sebagaimana terlampir pada dokumen ini.



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2020 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Banggai, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2020. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Banggai pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa.

Luwuk, Agustus 2019

INSPEKTUR,  
  
**IMRAN SUNI, SE., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630822 1991 1 001

**Lampiran 1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Rencana Tahun 2020	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	8	9
<b>01.</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>				<b>875.254.500</b>
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses/diagendakan	Luwuk	APBD	1.367 Lembar	7.701.000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Luwuk	APBD	4 Jaringan	99.000.000
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan roda dua dan roda 4 yang dibayarkan	Luwuk		24 Unit	8.900.000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan pembersih dan jumlah petugas kebersihan	Luwuk	APBD	2 Orang, 14 Jenis	47.000.000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dipergunakan	Luwuk	APBD	20 Jenis	41.345.500
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Luwuk	APBD	17 pak, 10 blok, 27 buah dan 3.345 lembar	11.040.000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Luwuk	APBD	1 Koran	1.800.000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat			614 dos	35.000.000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luwuk	APBD	17 kali	275.468.000
01.19.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah			60 kali	150.000.000
01.20.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Luwuk	APBD	10 Orang	198.000.000
<b>02.</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>				<b>2.331.680.000</b>
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Banggai	APBD	7 unit	1.107.510.000
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan			75 m dan 6 unit	84.250.000
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Luwuk	APBD	35 unit	755.000.000
02.10.	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan			68 unit	90.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Rencana Tahun 2020	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	8	9
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dipelihara			22 unit	45.500.000
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Luwuk	APBD	18 unit	7.420.000
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			45 unit	22.000.000
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi			200 m2 dan 30 m 2	220.000.000
<b>03.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	Luwuk	APBD		<b>180.150.000</b>
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan			57 pasang dan 47 set	62.050.000
03.04.	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri yang diadakan			47 pasang	16.450.000
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan pakaian batik tradisional yang diadakan			175 pasang	101.650.000
<b>05.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>				<b>396.750.000</b>
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal			12 orang	396.750.000
<b>06.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>	Luwuk	APBD		<b>28.402.000</b>
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah laporan LKJiP, LPPD, LKPJ			3 laporan	3.594.250
06.02.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu			2 laporan	5.631.500
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan pada akhir tahun			1 laporan	5.631.500
06.05.	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen PD, RKA, DPA, Renja, RKAP dan DPPA			6 laporan	13.544.750
<b>15</b>	<b>Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Persentase SDM APIP yang bersertifikat</b>				<b>1.299.648.000</b>
15.01.	Peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Internal JFA, P2UPD dan diklat substantif serta Pelatihan Kantor Sendiri			47 orang	1.299.648.000
<b>17</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Persentase penurunan temuan hasil pengawasan, Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjuti, Persentase pemenuhan rekomendasi tindakan lanjut</b>				<b>4.888.115.500</b>

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Rencana Tahun 2020	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	8	9
01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	Dalam Daerah	APBD	132 laporan	2.080.537.500
06	Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Dalam Daerah	APBD	523 rekomendasi	866.590.000
18	Evaluasi kinerja dan keuangan OPD	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja dan keuangan	Luar Daerah	APBD	3 laporan	305.800.000
21	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan hasil dimonitoring dan dievaluasi	Dalam/Luar Daerah	APBD	16 laporan	153.028.000
22	Review kinerja dan keuangan OPD	Jumlah Laporan hasil reuiu kinerja dan keuangan	Luwuk	APBD	6 laporan	454.460.000
27	Pemantauan Pelaksanaan SPIP	Jumlah Laporan hasil evaluasi SPIP	Luwuk	APBD	1 laporan	134.230.000
28	Pendampingan Pemeriksaan BPK	Jumlah pendampingan BPK	Luwuk	APBD	1 laporan	36.750.000
02	Penanganan kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Dalam Daerah	APBD	20 kasus	856.720.000
<b>JUMLAH</b>						<b>10.000.000.000</b>